



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam visi dan misi organisasi satuan kerja. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah.

Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem dimaksud dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 Tahun

2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Sehubungan dengan itu maka pelaksanaan dari rencana program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dibuatkan laporan sebagai pembuktian akuntabilitas terhadap kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan dana/anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud. Disamping itu, beberapa maksud dan tujuan yang dapat dilihat dalam penyusunan lakip ini, antara lain adalah :

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap informasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Sebagai informasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2022.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial terhadap kemampuan dana/anggaran yang di kelola.
5. Memenuhi kewajiban seperti yang diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Adapun Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2022 ini dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga unsur Penyelenggara Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan.

C. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 510).

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan dibidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial ; dan

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang, PHL sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) orang dan Tenaga pendamping sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	2 orang
4	Tenaga Fungsional	6 Orang
5	ASN	9 Orang

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister S2	6 orang
2	Sarjana S1	11 orang
3	Diploma III	1 orang
4	SMA/Sederajat	4 orang
5	SMP/Sederajat	-

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja serta diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan

2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial juga memiliki daftar inventaris yang dapat menunjang kinerja pada Dinas Sosial. Adapaun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Inventaris Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi			Tahun Perolehan
			Baik	Sedang	Rusak	
01.	Kendaraan					
	Mobil	2	2			2007,
	Motor	32	29		2	2007-2009,2011, 2013,2015,2021
02.	Bangunan					
	LK3	1	1			1976
	Kantor	1	1			1978
03.	Peralatan dan Mesin					
	Mesin Ketik Listrik	3			3	2009,2011,2013
	Lemari Besi	10	7		3	2014,2015,2016
	Rak Kayu	1			1	1997
	Filling Besi Metal	2			2	1976

	Brangkas	1	1			2011
	Lemari Kaca	4		4		1998,1999
	Lemari Kayu	4			4	2003,2007,2009
	Papan Pengumuman	1			1	1994
	White Board	1	1			2003
	Meja Kayu	14	6		3	1985,1994,1995,1997,2005,2007,2008,2021
	Kursi Besi Futura	84	84			2003, 2021
	Kursi Rapat	34	34			2011, 2021
	Kursi Tamu	4	4			1998,2003,2011
	Kursi Putar	3	3			2003,2005,2021
	Kursi Lipat	42	42			2013
	Meja Komputer	48	48			2014
	Meja Biro	1	1			2002
	Kursi Kerja	17	17			2014,
	Rak TV	1	1			2009
	AC	14	14			2009,2011,2012,2013,2014,2016,2019,2020
	Dispenser	4	4			2008,2009,2019
	Mesin Jahit	16	16			2008
	Komputer PC	33	5		28	2001,2003,2005,2007,2009,2010,2013,2014,
	Laptop	36	33		3	2008,2009,2010,2011,2013,2014,2016,2

						020,2021
	Notebook	9	9			2011,2012,2013,2014,2016
	Printer	23	14		9	2006,2007,2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2016,2020,2021
	Meja Kerja	14	14			2008,2009,2010,2011,2015
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8			2010,2011,2021
	Sound System	3	1		2	2011,2014,2021
	Camera	6	6			2009,2011,2012,2014
	Facsimile	2	1		1	2009,2016
	Proyektor	1	1			2010
	Layar Proyektor	1	1			2010
	Kulkas	2	2			2020
	Kulkas mini	1	1			2020
	Komputer Destop	7	7			2020, 2021
	I Ped	1	1			2020
	I ped (pkh)	30	30			2020
	Printer portable	1	1			2020
	Ups	2	2			2020,2021

Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Sosial ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi dinas sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Keuangan

Sebagai salah satu unsur pendukung yang memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, maka keberadaan sumber pendanaan mutlak diperlukan. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 Mendapat alokasi dana melalui APBD dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp. 0,00
b. Belanja Operasi	: Rp. 8.509.571.237,00
c. Belanja Modal	: Rp. 110.000.000,00
d. Total Belanja	: Rp. 8.619.571.237,00
e. Pembiayaan	: Rp. 0,00

Selain dukungan APBD, pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh anggaran pusat (APBN) melalui Kementerian Sosial dengan beberapa Program antara lain :

1. Program Sembako / BPNT, sebanyak 11.319 KPM dengan bantuan Rp. 200.000/bulan/KPM, sehingga total bantuan sebanyak Rp. 27.165.600.000,- yang disalurkan dalam 4 tahap.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 7.728 KPM dengan total bantuan sekitar Rp. 18.547.200.000,- juga disalurkan dalam 4 tahap
3. Bantuan Sosial Tunai BBM, sebanyak 12.083 KPM dengan jumlah bantuan sebesar 150.000/kpm/bulan selama 4

bulan sehingga total bantuan Rp. 7.249.800.000,-
Disalurkan dalam 2 tahap; dan

4. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 58.807 jiwa dengan bantuan sebesar 42.000/jiwa/bulan dengan total bantuan sebanyak Rp. 29.638.728.000 selama 1 tahun dan dibayarkan setiap bulan berjalan.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut diuraikan beberapa isu strategis terkait permasalahan internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian sasaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kurangnya tingkat kemandirian para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Terbatasnya aparatur atau tenaga pendamping bidang sosial;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS;
- d. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung seperti panti asuhan atau Rumah Singgah;
- e. Belum adanya kerjasama antar OPD terkait pemberdayaan masyarakat miskin;
- f. Belum optimalnya potensi dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun, yakni tahun 2021 sampai 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada/mungkin timbul.

Rencana Strategik memuat Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dan program- program.

A. RENCANA STRATEGIS

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumber daya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”**

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan hubungan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026 yang terkait dengan urusan sosial antara lain:

- Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan masyarakat dengan indikator tujuan persentase penurunan jumlah pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dengan indicator meningkatnya nilai SAKIP Dinas Sosial, meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatnya tertib administrasi keuangan dan asset daerah.

3. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) antara lain:

- Meningkatnya taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, TAGANA, LKS dan Dunia Usaha dalam penanganan PPKS.

4. Strategi

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Sosial.

Upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial menetapkan strategi yang di arahkan pada :

1. Meningkatnya Akses keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif.
2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
5. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
6. Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawa ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	40 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (SPM)	75 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	90 %
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana (SPM)	100 %

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik Tahun 2021-2026 disusun suatu rencana kerja setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahun 2022 merupakan komitmen seluruh staf untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi organisasi

sehingga seluruh proses administrasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 4 (Empat) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan bahan logistik kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan aset tetap lainnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial

a) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :

- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kab/Kota.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kab/Kota.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

3. Program Rehabilitasi Sosial

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial, dengan 6 (enam) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan alat bantu.
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
- Pemberian layanan kedaruratan.
- Pemberian layanan rujukan.

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti, dengan 6 (enam) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Pemberian layanan data dan pengaduan.
- Penyediaan Permakanan.
- Penyediaan Alat bantu.

- Pemberian Akses layanan Pendidikan dan Kesehatan
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.
- Pembererian layanan rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan 2 (Dua) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Penjangkauan anak-anak terlantar.
- Rujukan anak-anak terlantar.

b) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota.

5. Program Penanganan Bencana

a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Penyediaan makanan.
- Penyediaan sandang.
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS SOSIAL

Jln. Sosial No. 1 Parappa, Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, 02811, Bulaweil Selatan
Telepon (0414) 231007, Faksimile (0414) 231007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATTA AMIR, SP
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUH. BASLI ALI
Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Bupati Kepulauan Selayar,


H. MUH. BASLI ALI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial,


PATTA AMIR, SP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	40 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (SPM)	75 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	80 %
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana (SPM)	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.516.973.887
2	Pemberdayaan Sosial	230.000.000
3	Rehabilitasi Sosial	4.479.000.000
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	260.000.000
5	Penanganan Bencana	336.000.000
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	20.000.000

Benteng, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Bupati Kepulauan Selayar,


H. MUH. BASLI ALI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial,


PATTA AMIR, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KELUARAN	NASIL	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	Tersedia Dokumen RENJA & Perjanjian Kinerja	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Dokumen	Tersedia Dokumen RKA	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	1 Dokumen	Tersedia Dokumen RKAP	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen	Tersedia Dokumen DPA	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)	1 Dokumen	Tersedia Dokumen DPAP	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Realisasi Fiskal dan Keuangan (RFK) SKPD	1 Dokumen	Tersedia Dokumen RFK	
1.7	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Penyusunan LAKIP, Buku Profil, LPPD, LKPI & SPI	5 Dokumen	Tersedia Dokumen LAKIP, Buku Profil, LPPD, LKPI & SPI	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dapat Dipenuhi		Terlaksananya Administrasi Keuangan Dengan Baik	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial	24 Orang	Tersedia Gaji dan Tunjangan bagi ASN	
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tersedia Laporan Keuangan Akhir Tahun	
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran	12 Laporan	Tersedia Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	
2.4	Pengelolaan dan Penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksa BPK dan Inspektoral	1 Laporan	Tersedia Dokumen dan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peningkatan Kepegawaian Teknis Pegawai		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Pegawai	
3.1	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian yang baik	

3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Melalui Bimtek	5 Orang	Meningkatnya kompetensi ASN	
4	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Umum Dengan Baik		Terlaksananya Administrasi Umum Dengan Baik	
4.1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	
4.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Tersedia bahan logistik kantor	
4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	
4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedia Barang Milik Daerah Dengan baik	
5.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan dan mesin yang diadakan	15 Unit	Tersedia Unit Barang Yang diadakan	
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Baik	
6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Tersedia Jasa Surat Menyurat	
6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Tersedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
6.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	Tersedia jasa pelayanan umum kantor	
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedia Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik	
7.1	Pemeliharaan biaya pemeliharaan, biaya dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Operasional)	9 Unit	Tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Operasional)	
7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan dan mesin yang dipelihara	8 Unit	terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	
7.3	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Aset tetap lainnya yang dipelihara	8 Unit	terpeliharanya Aset tetap lainnya	
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
1	Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
1.1	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Yng meningkat kemampuannya	11 Orang	Meningkatnya kemampuan TKSK	

1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Kelurga Kewenangan Kab/Kota	PSKS Keluarga yang Meningkatkan Kemampuannya	4 Orang	Meningkatnya kemampuan Pendamping anak
1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	PSKS Lembaga (Karang Taruna)	2 KT	Meningkatnya kemampuan anggota Karang Taruna
1.4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Klien LK3 yang Mendapatkan Pelayanan kesejahteraan keluarga	10 Orang	Tersedianya Pelayanan Kesejahteraan Keluarga
C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial.	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial		Tertaksananya rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial.
1.1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah lanjut usia terantar, Disabilitas dan anak yatim piatu/yatim yang memperoleh bantuan santunan	340 KPM	Tersedianya bantuan santunan bagi lanjut usia terantar, disabilitas dan anak yatim piatu/yatim
✓ 1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia terantar, Disabilitas dan anak yatim piatu/yatim yang memperoleh bantuan sandang	60 Orang	Tersedianya bantuan sandang bagi lanjut usia terantar, disabilitas dan anak yatim piatu/yatim
✓ 1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang memperoleh bantuan peralatan	45 Orang	Tersedianya Alat Bantu Untuk Penyandang Disabilitas
1.4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pendamping PKH yang Memberikan Bimbingan/ Pendampingan	30 Orang	Tersedianya Pendampingan bagi anggota/peserta PKH
✓ 1.5	Pemberian Layanan Keadarutan	Pemberian Layanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum (ABH)	30 Orang	Tersedianya Layanan pendampingan dan mediasi terhadap ABH
✓ 1.6	Pemberian Layanan Rujukan	Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Tertangan	10 Orang	Tersedianya pendampingan dan rujukan bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa Tertangan (ODGJ)
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Pantii Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Pantii Sosial		Tertaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Pantii Sosial

2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Penerima EPNT/Sembako yang di pantau dan diawasi penyebarannya	10558 KPM	Tersedianya pengawasan dan pemantauan terhadap penyulran EPNT/Sembako
2.2	Penyediaan Pemakanan	Penyediaan Pemakanan	900 KK	Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan pemakanan
2.3	Penyediaan Alat Bantu	PMKS yang menerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)	417 KK	Tersedianya Alat Bantu UEP
2.4	Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Keluarga/ahli waris pahlawan yang mendapatkan penghargaan & Pelaksaaan Anjarsana	27 KK	Tersedianya Hak Ahli Waris Pahlawan dan pelaksanaan anjarsana
2.5	Pemberian Layanan Rujukan	Masyarakat Miskin yang memperoleh Rujukan bantuan Perbaikan Rumah	40 KK	Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan Perbaikan Rumah
2.6	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Mendapatkan Akses Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	90 Orang	Terwujudnya pelayanan pada SLRT
D. PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
✓ 1	Pemeliharaan Anak Terantar	Jumlah Pemeliharaan Anak Terantar		Tertaksananya Pemeliharaan Anak Terantar
1.1	Penjangkauan Anak-Anak Terantar	Anak Terantar Yang Berhasil Di Jangkau	50 Orang	Tertaksananya Penjangkauan Anak Terantar
1.2	Rujukan Anak- Anak Terantar	Anak terantar Yang Mendapatkan Bantuan	20 Orang	Tertaksananya Rujukan Anak Terantar Yang Mendapatkan Bantuan
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tertaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Dengan Aplikasi Sika-Ng dan SRT serta web Dinas Sosial	2 Aplikasi & 1 Web	Tersedianya Website Dan Aplikasi Dinas Sosial Kab. Kepulauan Selayar
E. PROGRAM PENANGKAPAN BENCANA				
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota		Tertaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
1.1	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan untuk korban bencana	44 KK	Korban Bencana Yang mendapatkan Bantuan Pemakanan (Sembako)
1.2	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang untuk korban bencana	29 KK	Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Sandang
1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi	30 KK	Korban Bencana/Orang Terantar Yang diasistansi dan dipulangkan

2	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota		Tertaksananya Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	
2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan larangan siaga bencana	Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang mendapatkan pelatihan	22 Orang	Tersedianya Operasional Bagi Anggota Tagana	
F.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
1	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		Tertaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	
1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Pelaksanaan Hari Pahlawan	1 Unit	terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	

Benteng, 3 Januari 2022

Bupati Kepulauan Selayar,


H. M. M. DASLI

Kepala Dinas Sosial,


PATTA AMIR SP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, diurut berdasarkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2022.

1. Sasaran "Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)"

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya yaitu:

1.1. Persentase PPKS yang memperoleh pemberdayaan sosial

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator di atas antara lain :

1. Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan

terhadap 11 (sebelas) orang pendamping TKSK di setiap kecamatan.

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan terhadap 4 (empat) orang pendamping anak se Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini memberikan bantuan pemberdayaan kepada karang taruna dengan target pada tahun 2022 sebanyak 3 KT yang terdiri dari 2 karang taruna desa dan 1 karang taruna kabupaten dengan jumlah anggota sekitar 80 orang, bantuan yang diberikan berupa peralatan musik, alat perbengkelan, peralatan sablon/percetakan dan bantuan peralatan sekretariat karang taruna kabupaten.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan antara lain:
- Penyediaan Alat Bantu dengan target 441 KK dan terealisasi sebanyak 441 KK, dengan jenis bantuan yang diberikan berupa peralatan Perbengkelan, Kawat duri, paket jualan Sembako, Mesin Senso, Bibit Sapi, Dari, alat Pertukangan dll

Target yang ingin dicapai pada indikator di atas sebanyak 40 % berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah PPKS yang menerima bantuan

pemberdayaan sebanyak 459 KK dan yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan sebanyak 1.188 KK sesuai dengan jumlah PPKS usia produktif, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 38,63 %. Target yang ingin dicapai pada indikator ini sebanyak 40 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 96,57 %

Masih kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan PPKS mempengaruhi jumlah target yang akan dicapai.

1.2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator di atas juga merupakan kegiatan yang mendukung pancapaian penerapan standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yaitu antara lain :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan beberapa sub kegiatan antara lain :
 - Penyediaan Permakanan yang diperuntukkan khusus untuk anak terlarat/yatim piatu, lansia terlantar dan penyandang disabilitas dengan target sebanyak 220 KPM dan terealisasi juga sebanyak 216 kpm dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (Tuga Juta Enam ratus Ribu Rupiah) per KPM.
 - Penyediaan Sandang merupakan kegiatan penyaluran bantuan dampak inflasi dengan target sebanyak 1.173 KPM dan terealisasi sebanyak 1.127 KPM, dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.

- Penyediaan alat bantu, dengan target sebanyak 45 KPM dan realisasi sebanyak 45 KPM dengan sasaran para penyandang disabilitas melalui bantuan berupa kursi roda, tongkat netra, tongkat elektrik dan alat bantu dengar.
 - Pemberian layanan kedaruratan, yang diperuntukkan khusus untuk anak yang berhadapan hukum (ABH) dengan penanganan berupa pendampingan dan mediasi, dengan jumlah anak yang berhasil didampingi dan dimediasi selama tahun 2022 adalah sebanyak 13 anak.
 - Pemberian Layanan Rujukan, sub kegiatan ini memfasilitasi para ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan secara insentif dari pihak-pihak terkait. Jumlah ODGJ yang berhasil difasilitasi selama tahun 2022 adalah sebanyak 10 orang.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan beberapa sub kegiatan antara lain:
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, kegiatan ini memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penyaluran BPNT/Program Sembako di 88 desa/Kel, dengan jumlah penerima bantuan BPNT sebanyak 10.588 KPM dengan bantuan berupa beras, telur dan buah-buahan senilai Rp. 200.000,- per KPM.
 - Penyediaan Permakanan, dengan target sebanyak 530 KK dengan bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 40 Kg/KK, dan terealisasi 100 %.

- Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga, kegiatan ini diperuntukkan khusus untuk keluarga/ahli waris pahlawan dan pelaksanaan anjungsana dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 25 KPM dan terealisasi sebanyak 25 KPM.
 - Pemberian Layanan Rujukan, kegiatan ini berupa pemberian bantuan rumah tidak layak huni dengan bantuan sebanyak Rp. 10.000.000,-/KPM dalam bentuk barang, target sebanyak 35 KK dan terealisasi 100 %
3. Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar, dengan 2 (dua) sub Kegiatan antara lain :
- Penjangkauan anak-anak terlantar, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak terlantar khususnya yang berada di kecamatan kepulauan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk tahun 2022 anak-anak yang berhasil dijangkau sebanyak 30 anak yang berada di Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu dan kecamatan Pasimasunggu Timur.
 - Rujukan anak-anak terlantar, kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak terlantar yang mendapatkan bantuan sembako yakni sebanyak 20 orang anak.
 - Kegiatan Pelayanan pada Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), SLRT juga merupakan salah satu program dari Kementrian Sosial berupa Pemberian Layanan dan Rujukan Terpadu, dalam hal ini pemberian layanan berupa rekomendasi PIP (Program Indonesia Pintar) dan Reaktivasi PBI-JKN

(Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan), jumlah yang telah dilayani sesuai dengan hasil registrasi Sekretariat SLRT sebanyak 225 rekomendasi PIP.

Dari data dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani dan tertangani selama tahun 2022 sebanyak 13.034 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KK, jadi realisasi capaian sebanyak 74,20 %.

Target yang ingin dicapai pada indikator di atas sebanyak 75 % sedangkan realisasi sebanyak 74,20 %. Persentase capaian adalah 98,93 % Tidak mencapai 100 % dari target yang ditentukan karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- 1. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pelayanan PPKS mengalami refocusing.*
- 2. Adanya KPM yang tidak dapat melengkapi dokumen pencairan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan (khusus untuk bantuan dampak Inflasi)*
- 3. KPM meninggal dunia sebelum bantuan diterima.*

1.3. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Kegiatan yang mendukung untuk indikator diatas antara lain :

1. Kegiatan pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/jompo terlantar, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, dengan target sebanyak 220 KPM dan terealisasi sebanyak 216 KPM.
2. Program Nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang biasa dikenal dengan PBI-JKN, untuk tahun 2022 jumlah penerima

(Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan), jumlah yang telah dilayani sesuai dengan hasil registrasi Sekretariat SLRT sebanyak 225 rekomendasi PIP.

Dari data dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani dan tertangani selama tahun 2022 sebanyak 13.034 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KK, jadi realisasi capaian sebanyak 74,20 %.

Target yang ingin dicapai pada indikator di atas sebanyak 75 % sedangkan realisasi sebanyak 74,20 %. Persentase capaian adalah 98,93 % Tidak mencapai 100 % dari target yang ditentukan karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- 1. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pelayanan PPKS mengalami refocusing.*
- 2. Adanya KPM yang tidak dapat melengkapi dokumen pencairan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan (khusus untuk bantuan dampak Inflasi)*
- 3. KPM meninggal dunia sebelum bantuan diterima.*

1.3. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Kegiatan yang mendukung untuk indikator diatas antara lain :

1. Kegiatan pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/jompo terlantar, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, dengan target sebanyak 220 KPM dan terealisasi sebanyak 216 KPM.
2. Program Nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang biasa dikenal dengan PBI-JKN, untuk tahun 2022 jumlah penerima

bantuan iuran jaminan kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 58.807 jiwa.

3. Program Keluarga Harapan (PKH), juga merupakan program nasional yang berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki 3 komponen PKH diantaranya
 - komponen pendidikan yaitu yang memiliki anak usia sekolah SD sampai SMA
 - Komponen Kesehatan yaitu masyarakat miskin yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun serta wanita hamil dan menyusui.
 - Komponen kesejahteraan yaitu masyarakat miskin yang memiliki lanjut usia di atas 70 tahun atau penyandang disabilitas.

Jumlah penerima PKH untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahap IV tahun 2022 sebanyak 7.728 KPM

4. Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nominal bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 / KPM yang disalurkan oleh Bank Himbara kemudian oleh PT Pos untuk tahap IV. Jumlah penerima Program Sembako untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 10.558 KPM.
5. Bantuan Langsung Tunai – Bahan Bakar Mintak (BLT-BBM) dengan nominal bantuan Rp. 150.000/bulan selama 4 Bulan yakni September s/d Desember dengan jumlah penerima sebanyak 12.083 KPM untuk anggaran APBN, sedangkan untuk anggaran APBD sebanak 1.113 KPM.

Dari data dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

selama tahun 2022 sebanyak 13.416 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KPM, jadi realisasi capaian sebanyak 76,37 %.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 90 % sedangkan realisasi sebanyak 76,37 %. Sehingga Persentase capaian adalah 84,86 %, namun untuk Jaminan Kesehatan yaitu peserta PBI-JKN dan BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sudah UHC yang artinya hamper 100 % penduduk kepulauan Selayar sudah memiliki kartu jaminan kesehatan.

2. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”

Dengan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran di atas yaitu:

2.1 Persentase penanganan korban bencana

Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan inidikator di atas antara lain :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Makanan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 45 KPM dan terealisasi 100 %
 - Penyediaan Sandang, kegiatan ini berupa pemberian bantuan seng terhadap korban bencana yang jumlahnya tergantung dari kerusakan akibat bencana tersebut yang dihitung berdasarkan hasil assesmen dari anggota Tagana dengan target 26 KPM dan terealisasi 100 %
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, kegiatan ini diperuntukkan untuk para korban yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti kapal terdampar,

orang hilang dan lain sebagainya, juga memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asalnya.

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, kegiatan ini memfasilitasi para anggota Tagana dalam melakukan aktivitasnya terutama pada saat tanggap darurat, dan pada saat evakuasi bencana.

Jumlah anggota tagana yang difasilitasi sebanyak 22 orang dengan pembagian tugas masing-masing kecamatan memiliki 2 orang anggota Tagana.

Dari data dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jumlah korban bencana yang tertangani selama tahun 2022 untuk APBD sebanyak 86 KK dan APBN sebanyak 1.257 KK dengan total sebanyak 1.343 KK dan jumlah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 1.343 KK atau sebanyak 100 %.

C. REALISASI KEUANGAN

Dari kelompok Belanja Langsung tersebut di atas Dinas Sosial merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.378.471.237,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.228.000.339,- atau 95,55 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 101.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 97.573.600,- atau

96,61 % dari alokasi anggaran., dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.019.200,- dengan capaian 95,82 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- dengan capaian 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- dengan capaian 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.950.000,- dengan capaian 92,67 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dengan alokasi anggaran 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- dengan capaian 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.480.000,- dengan capaian 94,80 %.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp.49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.624.400,- dengan capaian 96,21 %.
- b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Dengan alokasi anggaran Rp. 2.053.611.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.944.360.296,- Atau 94,68 % dari alokasi anggaran, dengan 4 (Empat) sub kegiatan antara lain:
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp.2.013.511.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.907.621.096,- dengan capaian 94,74 %.

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.410.000,- dengan capaian 94,00 %.
 - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran Rp.7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.979.200,- dengan capaian 93,06 %.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan alokasi anggaran Rp.7.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.350.000,- dengan capaian 84,00 %.
- c) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.55.700.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 49.622.000,- atau 89,09 % dari alokasi anggaran, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 5.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.550.000,- dengan capaian 97,37 %.
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.072.000,- dengan capaian 88,14 %.
- d) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.594.300.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 588.134.614,- atau 98,96 % dari alokasi anggaran, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- Atau 100 % dari alokasi anggaran.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp.24.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.616.000,- dengan capaian 93,07 %.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.425.000,- dengan capaian 74,25 %.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp.550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 548.093614,- dengan capaian 99,65 %.
- e) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.194.000,- Atau 96,59 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan yaitu :
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran Rp.110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.194.000,- dengan capaian 96,59 %.
- f) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.335.860.237,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 321.176.743,- Atau 95,63 % dari alokasi anggaran, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.992.000,- dengan capaian 99,99 %.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp. 98.461.237,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.785.743,- dengan capaian 85,10 %.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran Rp. 232.399.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.399.000,- dengan capaian 100 %.

- g) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.128.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 120.939.086,- atau 94,48 % dari alokasi anggaran, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.303.086,- dengan capaian 94,42 %.
 - Pemeliharaan aset tetap lainnya dengan alokasi anggaran Rp.3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.756.000,- dengan capaian 91,87 %.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.880.000,- dengan capaian 97,60 %.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dengan output program dengan alokasi anggaran Rp. 219.600.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 213.621.800,- atau 97,28 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran Rp. 219.600.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 213.621.800,- atau 97,28 % dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.49.9000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.769.000,- dengan capaian 99,74 %.

- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.072.000,- dengan capaian 95,72 %.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp.97.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.800.000,- dengan capaian 96,40 %.
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dengan alokasi anggaran Rp. 27.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.980.000,- dengan capaian 98,47 %.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan dengan alokasi anggaran Rp. 4.425.600.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.338.158.335,- atau 98,02 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) ***Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.*** dengan alokasi anggaran Rp. 2.051.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.014.954.935,- atau 98,22 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Permakanan dengan alokasi anggaran Rp. 1.018.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.003.328.600,- dengan capaian 98,56 %.

- Penyediaan Sandang dengan alokasi anggaran Rp. 647.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 626.060.000,- dengan capaian 96,76 %.
- Penyediaan alat bantu, dengan alokasi anggaran Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.855.000,- dengan capaian 99,88 %.
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 145.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.476.535,- dengan capaian 99,64 %.
- Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi anggaran Rp. 49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.456.000 ,- dengan capaian 99,91 %.
- Pemberian layanan rujukan, dengan alokasi anggaran Rp. 67.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.778.800,- dengan capaian 99,67 %.

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti, dengan alokasi anggaran Rp. 2.374.100.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.323.203.400,- atau 97,86 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi anggaran Rp. 92.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.268.000,- dengan capaian 84,61 %.
- Penyediaan Permakanan, dengan alokasi anggaran Rp. 391.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 374.854.000,- dengan capaian 95,65 %.

- Penyediaan Alat bantu, dengan alokasi anggaran Rp. 1.267.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.256.928.000,- dengan capaian 99,16 %.
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan, dengan alokasi anggaran Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.423.400,- dengan capaian 94,89 %.
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 69.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.130.000,- dengan capaian 99 %.
- Pemberian layanan rujukan, dengan alokasi anggaran Rp. 482.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 477.600.000,- dengan capaian 99 %.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dengan alokasi anggaran Rp. 251.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 242.574.300,- atau 96,64 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**, dengan alokasi anggaran Rp. 102.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.707.000,- atau 98,73 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penjangkauan anak-anak terlantar, dengan alokasi anggaran Rp. 29.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.497.000,- dengan capaian 99,99 %.
 - Rujukan anak-anak terlantar, dengan alokasi anggaran Rp. 72.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.210.000,- dengan capaian 98,22 %.
- b) **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran Rp. 149.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar

Rp. 141.867.300,- atau 95,21 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota, dengan alokasi anggaran Rp. 149.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 141.867.300,- dengan capaian 95,21 %

5. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp. 325.500.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 324.702.600,- atau 99,91 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) ***Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota***, dengan alokasi anggaran Rp. 189.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 189.294.600,- atau 99,89 dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan makanan, dengan alokasi anggaran Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.916.000,- dengan capaian 99,91 %
- Penyediaan sandang, dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.891.000,- dengan capaian 99,78 %
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi, dengan alokasi anggaran Rp. 49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.487.000,- dengan capaian 99,97 %

b) ***Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***, dengan alokasi anggaran Rp. 135.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 135.408.000,- atau 99,93 % dari alokasi anggaran dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan alokasi anggaran Rp. 135.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 135.408.000,- dengan capaian 99,93 %

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan alokasi anggaran Rp. 19.900.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.900.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 19.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.900.000,- adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 19.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.900.000,- dengan capaian 100 %

Dari penjelasan di atas dapat dilihat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dalam tabel di bawah berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	40 %	38,63 %	96,57 %
		Persentase PPKS yang memperoleh	75 %	74,20 %	98,93 %

		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	76,37 %	84,86 %
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	100 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai media pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Secara umum sasaran Strategik yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Tahun 2022, telah mencapai hasil sesuai target yang diharapkan, tentunya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut kedepan antara lain :

1. Masih terbatasnya Kuantitas pegawai, sehingga pelaksanaan tugas – tugas kedinasan terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai, masih perlu penambahan Komputer, Laptop, printer dan penambahan ruangan Kantor serta pengadaan Operasional roda 4 dan roda 2 untuk penanggulangan bencana.
3. Belum adanya Rumah singgah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap PPKS.
4. Masih terbatasnya alokasi dana baik yang berasal dari APBN APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

Adapun upaya – upaya/usaha – usaha yang ditempuh oleh Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a. Diusulkan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk anggaran Tahun 2023 yang akan datang.
- c. Mengusulkan pembangunan Rumah Singgah untuk tahun anggaran 2024.

- d. Mengharapkan kucuran bantuan dana pembangunan yang lebih banyak dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Kegiatan tahun 2023 mendatang dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan lagi.

Benteng, Februari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL,

Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19730217 199803 2 011